

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rekrutmen politik merupakan proses pertama yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja parlemen (legislatif). Jika kemampuan dan legitimasi elit politik saat ini sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah adanya kecacatan dalam proses rekrutmen. Salah satu Partai Politik besar yaitu Partai Gerindra memiliki metode perekrutan sendiri, terutama dalam penerapan sistem perekrutan dan prosedur yang dilakukan oleh partai.

Dari hasil penelitian, pola rekrutmen yang umum digunakan partai Gerindra adalah rekrutmen semi terbuka. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian bahwa Partai Gerindra melakukan sosialisasi tentang rekrutmen untuk memberitahu serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Dewan Pengurus Cabang Gerindra juga membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki kualifikasi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Padang tanpa membedakan ras, suku, agama dan gender, tetapi Partai Gerindra juga menerapkan proses rekrutmen tertutup yang memprioritaskan kader dan fungsionaris ditingkat daerah, cabang maupun ranting partai yang akan diusung untuk menjadi calon

legislatif. Mereka yang diangkat adalah orang yang sudah diperhitungkan kemampuan dan loyalitasnya terhadap partai Gerindra. Namun mereka tetap harus melalui tahap seleksi yang sama dengan caleg tokoh masyarakat. Pada proses penetapan calon legislatif juga tertutup, hal ini berkaitan dengan keputusan bakal calon legislatif yang masih di dominasi oleh putusan pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, selanjutnya Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang mengikuti putusan tersebut.

Dari hasil penelitian dan data yang peneliti dapatkan ada 3 kategori umum menurut Nurliah Nurdin dalam melihat apakah partai politik sentralistik atau tidak, 3 kategori seperti *person* atau sumber daya manusia, *policy* atau kebijakan, hingga keuangan atau *money*, ketiga nya terlihat dalam Partai Gerindra. Dalam proses rekrutmen bacaleg partai Gerindra, keputusan final berada pada putusan Dewan Pimpinan Pusat, dan Dewan Pengurus Daerah/ Dewan Pengurus Cabang secara mutlak menerima putusan itu, walaupun memang putusan tersebut hasil musyawarah mufatar antara Dewan Pengurus Daerah/ Dewan Pengurus Cabang dengan Dewan Pimpinan Pusat internal dan elit partai Gerindra. Dalam urusan keuangan, AD-ART Partai Gerindra juga mengatur bahwa bentuk pendanaan hanya tertuju kepada rekening Partai Gerindra dan segala kegiatan juga atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat, dalam hal ini kecenderungan sentralistik Partai Gerindra memang terlihat adanya, namun dibungkus dengan kegiatan kegiatan yang bersifat demokrasi aktif seperti menanggapi masukan-masukan

masyarakat namun dalam pengelolaannya Partai Gerindra cenderung sangat sentralistik selain itu, bentuk Partai Gerindra yang merupakan Partai Mandat juga mempengaruhi bagaimana proses rekrutmen bacaleg di daerah yang harus mendapatkan mandat terlebih dahulu dari Dewan Pengurus Pusat.

6.2 Saran

1. Partai Politik

Proses rekrutmen harus terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat harus memperoleh informasi yang relevan dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, *track record* masing-masing kandidat, dan proses seleksi hingga penetapan daftar calon. Partai politik wajib menyebarluaskan informasi (sosialisasi) setiap kandidat-kandidatnya secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka terhadap kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat.

2. Pemerintah

Untuk memperkuat sistem politik demokrasi, kepemimpinan politik ditingkat lokal harus menekankan bahwa kehadiran perwakilan-perwakilan merupakan gambaran seluruh rakyat didaerah tersebut. Dengan kata lain, jika seorang kandidat terpilih untuk mewakili daerahnya, ia harus bisa meninggalkan urusan terhadap hubungan partai politik yang mendukungnya. Keberadaannya harus dikembalikan menjadi milik publik dan bukan milik kelompok tertentu.

Termasuk komitmennya untuk mendukung atau memenangkan salah satu calon/parpol dalam kegiatan pemilu diseluruh tingkatan. Agar birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, pelayanan publik dan pembangunan yang baik maka keberadaan seorang wakil rakyat harus bersikap netral.

3. Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian sangat minim membahas sejauh mana sentralistik Partai Gerindra, penelitian berfokus pada kecenderungan sentralistik partai Gerindra dalam proses tahapan pemilihan legislatif Kota Padang tahun 2019. Untuk itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam membahas secara holistik bagaimana fenomena sentralisasi dalam institusi partai, selain itu anomali-anomali sentralistik keuangan dalam institusi partai juga bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan.

